

SELYANG PANDANG HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA

Persahabatan, dukungan, dan kerja sama mewarnai 70 tahun relasi diplomatik Indonesia-Australia, dan selama itu tak terhitung tokoh dari dua negara bertetangga ini saling berkontribusi untuk membentuk, mendefinisikan, serta mengarahkan hubungan baik ini. Hubungan Indonesia-Australia telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Australia menjadi salah satu negara yang memberikan dukungan politis terhadap perjuangan Indonesia meraih kemerdekaannya. Tidak hanya itu, Australia juga merupakan salah satu

negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945.

Jejak sejarah disematkan kepada sejumlah orang; dua di antaranya adalah Richard Justice Kirby dan Thomas Critchley, yang merupakan delegasi Australia pada Perundingan Renville. Mereka berupaya untuk membuat Perjanjian Gencatan Senjata Renville Januari 1948 adil bagi Republik Indonesia. Kontribusi serta dukungan kuat mereka pada bangsa ini diakui lewat penganugerahan Bintang Jasa Utama kepada mereka.

Di kemudian hari, mencuat nama David Hurley yang secara pribadi memiliki andil besar dalam meningkatkan hubungan pertahanan Indonesia-Australia. Selain berperan aktif membentuk Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia (IKAHAN), Hurley selama masa jabatannya sebagai Kepala Angkatan Pertahanan Australia (2011-2014) berkontribusi besar dalam berbagai aspek kerja sama militer dua negara. Ia juga pendukung kuat hubungan bilateral bidang pertahanan, khususnya pengembangan calon pemimpin generasi masa depan.

PERBINCANGAN DENGAN ATASE PERTAHANAN KEDUTAAN BESAR AUSTRALIA UNTUK INDONESIA

BRIGADIR JUSTIN ROOCKE



HUBUNGAN PERTAHANAN KAMI MEREFLÉKSIKAN JANGKAUAN KEMITRAAN BILATERAL YANG LEBIH LUAS. - BRIGADIR JUSTIN ROOCKE

Oleh: **Yuli Ari, M.Si. (Han)**

Foto: **M. Aslam Iqbal**

Indonesia dan Australia memiliki jejak sejarah hubungan pertahanan cukup panjang. Dalam perkembangannya, hubungan pertahanan kedua negara bertetangga ini pun kerap mengalami pasang surut. Namun, Indonesia-Australia terus berupaya menjalin hubungan pertahanan yang baik, efektif, produktif, dan saling menguntungkan, mulai dari forum dialog strategis, pendidikan, pelatihan, hingga latihan bersama menjadi hal yang tidak terlepas dari hubungan pertahanan kedua negara. Tim **Indonesia Defense Magazine (IDM)** berbincang dengan Atase Pertahanan Australia Brigadir Justin Roocke untuk mendapatkan telaah

mendalam hubungan pertahanan kedua negara. Disambut hangat di kantor Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Jumat (18/12), kami diterima pria lulusan Lemhannas RI tahun 2018 yang menjelaskan bagaimana dinamika geopolitik saat ini berpengaruh terhadap kebijakan pertahanan Australia. Berikut kutipan wawancaranya:

Australia telah mengumumkan perubahan yang signifikan, ekstensif, dan pesat dalam Strategi Pertahanan 2020. Apa faktor utama yang mendasari perubahan tersebut?

Pembaruan Strategis Pertahanan Australia 2020 mengakui bahwa kawasan Indo-Pasifik berada di antara tatanan strategis terpenting sejak Perang Dunia II. Persaingan strategis, pengenalan sistem militer yang lebih mumpuni sebab perkembangan teknologi, dan pemanfaatan beragam taktik zona abu-abu (*gray-zone tactics*) mengalami akselerasi lebih cepat dari perkiraan.

Meski terkesan mustahil, prospek konflik intensitas tinggi di Indo-Pasifik masih mendekati mungkin (akan terjadi). Singkatnya waktu menjadi penanda bahwa kami tidak dapat lagi berasumsi bahwa Australia punya banyak kesempatan untuk secara bertahap 'menyesuaikan' kesiapan dan kapabilitas militer untuk merespons setiap tantangan yang baru muncul.

Dalam Buku Putih Pertahanan kami tahun 2016, Pemerintah Australia secara umum menguraikan rencananya untuk membangun Angkatan Pertahanan Australia yang lebih kuat, kompeten, dan aktif untuk memastikan kami berada dalam posisi terbaik untuk melindungi kepentingan nasional—pembaruan terkini dibuat berdasarkan hal tersebut.

Pembaruan Strategis Pertahanan secara khusus memprioritaskan fokus Angkatan Pertahanan Australia pada wilayah terdekat kami; mulai dari belahan timur laut Samudera Hindia pada jangkauan maritimnya, serta daratan Asia Tenggara hingga Papua Nugini dan Pasifik Barat Daya. Fakta ini sekaligus mengingatkan kami untuk memperkuat hubungan militer di kawasan

tersebut, termasuk dengan Indonesia, demi mendukung ketahanan negara-negara kawasan dan menjaga kedaulatan mereka, sama seperti ketika kami berupaya mempertahankan kedaulatan kami sendiri.

Yang tak kalah penting, Pemerintah Australia juga mempertimbangkan dampak dari krisis dan bencana alam yang terjadi seperti pandemi COVID-19, kebakaran hutan, dan banjir pada musim panas lalu. Angkatan Pertahanan Australia akan tetap siap siaga untuk membantu penanganan atas peristiwa-peristiwa semacam itu, baik di Australia maupun di seluruh kawasan kita.

Bagaimana Australia memandang dinamika geopolitik di kawasan saat ini?

Lingkungan strategis Australia menjadi lebih kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Ini dipicu persaingan strategis, pengenalan sistem militer yang lebih canggih sebab teknologi tinggi, dan penggunaan ragam taktik zona abu-abu. Kepentingan nasional Australia saat ini dihadapkan dengan tantangan langsung (di depan mata) dibanding sebelumnya. Maka, prioritas yang lebih jelas diperlukan untuk berfokus pada ancaman dengan prioritas tertinggi bagi kepentingan nasional Australia.

Pembaruan Strategis Pertahanan merinci strategi pertahanan baru Australia untuk merespons lingkungan strategis yang terus berubah. Hal ini menjadi peletak dasar dibuatnya tiga tujuan strategis baru sebagai panduan untuk seluruh rencana Pertahanan termasuk kapabilitas, keterlibatan internasional, dan operasi: membentuk lingkungan strategis Australia demi mewujudkan perdamaian dan kemakmuran; untuk mencegah tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Australia; dan meresponsnya dengan kekuatan militer yang kredibel, bila diperlukan.

Pembaruan tersebut mengakui bahwa Angkatan Bersenjata Australia harus tetap menjadi kekuatan yang dapat dikerahkan, mampu beroperasi di seluruh Indo-Pasifik, dan lokasi lebih jauh bila diperlukan. Melalui Pembaruan terkini ini, kami berupaya memasti-

kan pengaturan kebijakan pertahanan Australia memungkinkan kami untuk merespons secara fleksibel tantangan-tantangan baru yang bermunculan. Yang terpenting, Pembaruan tersebut memprioritaskan keterlibatan militer Australia di Indo-Pasifik. Ini mengindikasikan kerja sama lebih erat dengan negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, untuk mendukung stabilitas kawasan dan kemakmuran ekonomi.

Pemerintah Australia berkomitmen untuk membangun hubungan khusus dengan ASEAN guna membantu memperkuat peran ASEAN di dialog dan kerja sama regional. Kami juga ingin meningkatkan hubungan militer mini-lateral di seluruh kawasan, seperti kerja sama trilateral dan *quadilateral* pada isu-isu terkait kepentingan bersama, dengan tujuan bersama untuk mengukuhkan kedaulatan dan stabilitas kawasan. Dalam konteks ini, kami ingin bekerja sama dengan mitra yang memiliki visi sejalan seperti Indonesia dan India.

Ini juga berarti membangun investasi Australia di Pasifik dan memastikan efektivitas yang berkelanjutan dari *Pacific Step-up*. Selain Asia Tenggara, Pasifik adalah poros *strategic outlook*, kebijakan luar negeri, dan koneksi personal Australia.

Selain Laut Cina Selatan, hal apa yang menjadi perhatian Australia?

Lingkungan strategis saat ini 'menguji' kepentingan kita daripada sebelumnya. Sejatinya, Australia menginginkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan makmur. Beberapa tahun terakhir, sejumlah persaingan strategis memberi ruang bagi kekuatan-kekuatan besar untuk menjadi lebih asertif dalam memajukan preferensi strategis mereka dan berusaha menggunakan pengaruhnya di wilayah terdekat. Pada saat yang sama, aturan, norma, dan institusi yang turut andil menjaga perdamaian dan keamanan berada di bawah tekanan. Negara-negara harus memenuhi kepentingan mereka dengan saling menghormati dan mendukung stabilitas, kemakmuran, dan keamanan.

Pandemi COVID-19 menimbulkan banyak ketidakpastian. Implikasi jangka panjang di sektor keamanan

masih belum jelas, tetapi dampaknya terhadap pertumbuhan regional, perdagangan dan masyarakat akan memiliki konsekuensi jangka panjang yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Modernisasi militer yang semakin cepat, teknologi yang muncul dan tidak dapat dikendalikan, serta ekspansi kapabilitas jagat siber, semakin memperumit lingkungan Australia.

Sejumlah media melaporkan bahwa Australia dan Jepang mengadopsi pakta pertahanan selama kunjungan Perdana Menteri Australia Scott Morrison ke Jepang. Faktor-faktor apa yang mendasari pembentukan pakta pertahanan tersebut?

Perdana Menteri Morrison mengunjungi Jepang pada 17 November, di mana ia dan Perdana Menteri Yoshihide Suga mengumumkan bahwa Australia dan Jepang telah mencapai "agreement in principle" pada Perjanjian Akses Timbal Balik (*Reciprocal Access Agreement*-RAA). Nilai kerja sama Australia dan Jepang tidak pernah sebesar di masa sulit seperti ini. Pembentukan RAA akan menyederhanakan pengaturan bagi pasukan kami untuk beroperasi di wilayah masing-masing; dan menggerakkan hubungan pertahanan bilateral menuju interoperabilitas mendalam sesuai tujuan kami. Ini akan meningkatkan kemampuan Australia dan Jepang untuk bekerja sama dengan mitra lain yang sejalan, dalam mendukung Indo-Pasifik yang damai dan stabil.

Australia dan AS telah menandatangani pernyataan rahasia terkait strategi kerja sama militer. Langkah tersebut akan membentuk "Kelompok Kerja postur kekuatan bilateral untuk mengembangkan rekomendasi yang akan memajukan kerja sama postur-kekuatan di Indo-Pasifik untuk mempromosikan kawasan yang aman dan stabil

serta mencegah tindakan koersif dan penggunaan kekuatan." Bagaimana rekomendasi ini mengubah dan mempengaruhi kesepakatan antara Australia dan Indonesia?

Pada AUSMIN 2020, Australia dan Amerika Serikat menyetujui serangkaian klausul pertahanan untuk memajukan kerja sama, termasuk penandatanganan Pernyataan Prinsip Kerja Sama Pertahanan Aliansi dan Prioritas Postur Kekuatan di Indo-Pasifik untuk mengawal kontribusi kami pada keamanan regional yang akan mendukung Indo-Pasifik yang aman, makmur, inklusif dan berbasis aturan, serta mencegah tindakan destruktif.

Pernyataan Bersama itu tidak mengubah atau mengerdilkan hubungan Australia dengan Indonesia. Australia membuat keputusan tentang keterlibatan AS sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Kami mendukung AS untuk melanjutkan perannya dalam menjamin keamanan di wilayah kami. Australia akan terus bekerja dengan Amerika Serikat, dan semua mitra regional, untuk membangun kerja sama pertahanan di kawasan demi menghadapi tantangan keamanan, dan untuk membangun pendekatan bersama untuk memastikan stabilitas di kawasan kami.

Apakah pendapat Australia tentang perkembangan kerja sama pertahanan antara Australia dan Indonesia saat ini?

Fantastis! Australia dan Indonesia memiliki ikatan unik sebagai tetangga di persimpangan maritim Samudera Hindia dan Pasifik. Mempertahankan wilayah yang aman dan stabil adalah prioritas strategis bagi kedua negara, dan ini mendorong kerja sama di berbagai bidang. Kami berbagi banyak kepentingan keamanan bersama, termasuk perbatasan laut bersama, dan komitmen untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan kami. Kerja sama pertahanan kami sebagian besar berfokus pada pendidikan dan pelatihan, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, keamanan maritim dan misi pemeliharaan perdamaian.

Sebelum pandemi COVID-19, kami memproyeksikan 2020 sebagai tahun teraktif dalam hubungan pertahanan Australia-Indonesia. Pandemi COVID-19 kemudian menyebabkan banyak dari kegiatan tersebut harus ditunda, tetapi kami masih dapat mempertahankan beberapa aktivitas pendidikan dan pelatihan, serta memperluas kerja sama di bidang kedokteran militer.

Para pemimpin senior kami berupaya menjaga komunikasi selama pandemi, berbagi pengalaman kami dalam menangani COVID-19 dan pelajaran yang didapat. Menteri Pertahanan Australia dan Indonesia telah berbicara secara reguler, demikian pula para panglima militer kita, Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal Angus Campbell, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Kepala Dinas dan pejabat pemangku kebijakan juga tetap terhubung.

Melalui sambungan telepon pada Juni 2020, Menteri Pertahanan Reynolds menawarkan 30-ton Alat Pelindung Diri (APD) di bawah Program Kerja Sama Pertahanan kami kepada Menteri Pertahanan Prabowo untuk membantu menjaga keamanan dan keselamatan teman-teman TNI saat mereka ambil bagian dalam perang melawan pandemi COVID-19 dan memberi dukungan kepada rakyat Indonesia.

Kedua menteri terus berupaya menjaga kontak selama pandemi, dan Menteri Pertahanan Reynolds dengan senang hati dapat menawarkan bantuan, terutama setelah Indonesia membantu penanggulangan musibah kebakaran hutan yang meluluhlantakkan Australia awal tahun ini. Australia dan Indonesia memiliki sejarah panjang untuk saling mendukung pada saat dibutuhkan dan krisis, bermula dari peran aktif Indonesia membantu pemulihan Kota Darwin pascaterjangan Topan Tracey pada tahun 1974. Saya yakin kerja sama ini akan kembali ke level tinggi sebelumnya bila pandemi COVID-19 berhasil diatasi.

Apa ancaman, yang tergolong aktif dan prioritas tinggi, yang saat ini dilihat oleh Komite Intelijen Australia sebagai masalah murni bangsa Indonesia, dan bagaimana kedua pemerintah bekerja sama untuk memastikan



bahwa ancaman ini dapat ditangani?

Australia tidak berkomentar mengenai masalah intelijen. Yang dapat saya katakan di sini adalah bahwa kerja sama intelijen merupakan elemen kunci dari hubungan bilateral kita di bidang pertahanan, sesuai kepentingan bersama. Kerja sama ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Perjanjian Lombok 2006 dan *code of conduct* (CoC) yang ditetapkan, serta dalam Pemahaman Bersama 2014 tentang kerja sama intelijen. Ini termasuk komitmen untuk meningkatkan kerja sama intelijen sesuai dengan hukum nasional masing-masing, dan diawasi oleh Sub Komite Intelijen Gabungan, yang melapor kepada Panglima TNI/CDF yang diketuai bersama Komite Tingkat Tinggi.

TNI AL dan *Royal Australian Navy* (RAN) melakukan latihan militer di perairan Anambas pada 8 Desember 2020. Apa tujuan dari latihan militer tersebut? Apa yang harus dilakukan kedua Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas kawasan?

TNI AL dan RAN secara rutin menggelar latihan bersama di laut, termasuk saat Patroli Terkoordinasi dan Latihan bersama CASSOWARY tahunan kami. Setiap kali kapal RAN atau TNI AL melintas di dekat perairan tetangga dan memiliki waktu luang, kami juga berupaya melakukan latihan lintas (PASSEX). Rata-rata, angkatan laut kami melakukan 4-6 PASSEX setiap tahun, dan ini adalah

kesempatan luar biasa bagi kami untuk memperbarui dan memperkuat persahabatan kami.

Sebagai mitra dengan banyak kepentingan keamanan bersama, penting untuk memanfaatkan peluang ini saat muncul. Kami berbagi salah satu batas maritim terpanjang di dunia. Samudera Hindia belahan Timur Laut, serta Laut Timor dan Arafura, di mana dua negara memiliki kepentingan yang sama, kaya akan sumber daya alam dan terancam oleh *illegal fishing*, penyelundupan, dan aksi-aksi kejahatan lintas negara lainnya. Bahwa kami dapat melakukan PASSEX dengan pemberitahuan minim dan persiapan terbatas mempertegas profesionalisme Angkatan Laut dan interoperabilitas kami yang berkembang.

Apa bidang utama dari kepentingan bersama dalam hal Manufaktur Pertahanan dan bagaimana seharusnya kedua negara menciptakan industri pertahanan yang saling menguntungkan dalam waktu dekat?

Kolaborasi industri pertahanan adalah bidang kerja sama yang baru namun terus berkembang dalam hubungan pertahanan bilateral kami. Dipandu oleh dukungan kuat dari para Menteri Pertahanan, Kelompok Kerja Industri Pertahanan dan Modernisasi Militer dari Dialog Strategis Pertahanan Indonesia-Australia bertemu setiap tahun untuk membahas peluang-peluang kolaborasi dan kerja

sama di bidang modernisasi militer, perencanaan, akuisisi dan keberlanjutan, serta kerja sama sains dan teknologi.

Para senior pertahanan juga bertatap muka secara berkala di sela-sela kegiatan ekspor industri pertahanan utama, seperti Indo Defence Expo yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan dan pameran yang berbasis di Australia, termasuk Angkatan Darat Australia, Avalon International Airshow Angkatan Udara Australia, dan Pacific Maritime Expo Angkatan Laut Australia.

Pada 2018, kami memulai Seminar Industri Pertahanan Bilateral tahunan, yang dirancang untuk membantu mengenalkan perusahaan-perusahaan Australia dan Indonesia ke pasar yang lebih besar dan untuk meningkatkan pemahaman industri pertahanan tentang pengaturan kebijakan industri dan rencana akuisisi kapabilitas masing-masing negara.

Senang sekali melihat kerja sama industri pertahanan Australia dan Indonesia, seiring banyaknya perusahaan yang menjajaki peluang kolaborasi. Ini menjadi bukti bahwa kemitraan dapat mendatangkan manfaat bersama sekaligus memenuhi persyaratan kapabilitas militer kita. Kami berharap kemitraan dan inovasi industri pertahanan Australia dan Indonesia ini tetap berlangsung hingga tahun-tahun mendatang.

Hasil utama apa yang Anda harapkan dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia?

Ketika situasi di kawasan kita menjadi lebih kompleks, saya berharap kepentingan kita akan menjadi lebih selaras. Wilayah yang damai, inklusif, berdaulat, dan tangguh di mana hak-hak semua negara dihormati untuk kepentingan bersama. Fokus kami di tahun 2021 adalah kembali ke aktivitas tingkat tinggi sebelumnya, sambil menunggu perkembangan situasi COVID-19. Kami memiliki banyak aktivitas pertahanan baru yang menarik, yang direncanakan untuk tahun 2020. Kami akan secepat mungkin meninjaunya kembali. Ini termasuk sinkronisasi beberapa latihan *Service-to-Service* kami untuk membuatnya lebih kompleks, menghasilkan hasil latihan yang lebih baik, dan meningkatkan kemampuan kami untuk bekerja sama.

Hubungan pertahanan kami

merefleksikan jangkauan kemitraan bilateral yang lebih luas. Pada tahun 2018, kami menandatangani Kemitraan Strategis Komprehensif kami dan baru tahun ini, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif kami mulai berlaku. Hal ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara kedua negara (Indonesia dan Australia), dan saya berharap hubungan *people-to-people* terus menguat, terutama di sektor bisnis (*business-to-business*, B2B). Saya melihat banyak peluang kerja

sama yang saling menguntungkan, terutama antara industri pertahanan masing-masing.

Berbicara tentang hubungan *people-to-people*, tahun depan menandai peringatan sepuluh tahun Ikatan Alumni Pertahanan Australia-Indonesia kita, IKAHAN. Selama sepuluh tahun terakhir, IKAHAN telah memainkan peran penting dalam memelihara dan memperkuat hubungan personal (*people-to-people*) antara militer dua negara, dan mempromosikan saling pengertian

dan kepercayaan.

IKAHAN secara resmi diluncurkan pada Maret 2011 oleh Gubernur Jenderal Australia sekarang, H.E David John Hurley AC DC (Purn) dan Marsekal TNI (Purn) Edy Harjoko, dan telah berkembang menjadi lebih dari 3.000 anggota saat ini. Saya berharap dapat merayakan tonggak penting ini bersama teman dan mitra saya di TNI tahun depan, bila situasi pasca-COVID-19 memungkinkan.

A GLANCE AT INDONESIA-AUSTRALIA BILATERAL RELATIONS

Friendship, support, and cooperation have marked 70 years of diplomatic relations between Indonesia and Australia. Over this time, a number of figures from both neighboring countries have contributed to shape, define and direct this meaningful relationship. Indonesia-Australia relations were forged from the advent of Indonesian independence. Australia is one of the major supporters for Indonesia's struggle for independence, as well as one of the first countries to recognize Indonesian sovereignty following the

Proclamation of Independence on 17 August 1945.

A number of people have marked historical traces, including Richard Justice Kirby and Thomas Critchley, both Australian delegates to the Renville negotiations. They strived to make the Renville Truce Agreement of January 1948 a fair deal for the Republic. Their strong contribution and support of this nation was recognized with the presentation of a Bravery Star Decoration (Bintang Jasa Utama).

Later, David Hurley's name

emerged, as he personally played a major role in defense relations between Indonesia and Australia. In addition to playing an active role in forming the Australia-Indonesia Defence Alumni Association (IKAHAN), during his tenure as Head of the Defense Force (2011-2014), Hurley contributed greatly to various aspects of military cooperation between the two countries. He extended strong support to the bilateral relations in the defense sector, especially in regards to the development of future leaders.

CONVERSATION WITH BRIGADIER JUSTIN ROOKE, AUSTRALIAN EMBASSY DEFENSE ATTACHÉ TO INDONESIA

By: **Yuli Ari**
Photo: **M. Aslam Iqbal**

While Indonesia and Australia share a long history of defense relations, there have been issues occasionally arising between the two neighboring countries. However, both Indonesia and

Australia continue to strive for a good, effective, productive and mutually-beneficial defense relationship. Beginning with strategic dialogue forums, education and training to joint exercises, they are inseparable from the defense relations between the two countries. **Indonesia Defense Magazine (IDM)** was presented the opportunity to talk to Australian Defense Attaché Brigadier Justin Rooke, to gain an in-depth insight into defense relations between the two countries. Cordially welcomed at the Australian Embassy to Indonesia, Friday (18/12), Brigadier Justin Rooke, a graduate of the Indonesian National Resilience Institute (Lemhannas RI) in 2018, also explained to IDM how current geopolitical dynamics affect Australia's defense policy. The following are excerpts from our talk:

Australia has announced significant, extensive and rapid changes in its 2020 Defense Strategy? What are the major factors underlying the need for these changes?

Australia's new 2020 Defence Strategic Update recognises that our region, the Indo-Pacific, is in the midst of the most consequential strategic realignment since World War II. Strategic competition, the introduction of more capable military systems enabled by technological change, and the use of diverse grey-zone tactics are accelerating faster than anticipated.

The prospect of high-intensity conflict in the Indo-Pacific, while still unlikely, is less remote than in the past. Reduced warning times mean Australia can no longer assume we will have time to gradually

adjust military capability and preparedness in response to emerging challenges.

Under our 2016 Defence White Paper, the Australian Government outlined its plan to build a more potent, capable and agile Australian Defence Force, in order to ensure we were best positioned to protect our national interest – the recent update builds on this important work.

Notably, the Defence Strategic Update prioritises the Australian Defence Forces focus in our immediate region; that is, the area ranging from the north-eastern Indian Ocean through maritime and mainland Southeast Asia to Papua New Guinea and the Southwest Pacific. It also calls on us to intensify our military relationships in the region, including with Indonesia, to help support the resilience of regional countries and safeguard their sovereignty, as well as our own.

Importantly, the Australian Government has also considered the implications of ongoing and recent natural emergencies and crises, including the COVID-19 pandemic, and the bushfires and floods last summer. The Australian Defence Force will remain ready to assist with responding to such events, both in Australia and throughout our region.

How does Australia perceive the current geopolitical dynamics in the region?

Australia's strategic environment has become more complex in recent years. This is being driven by strategic competition, the introduction of more capable military systems enabled by technological change, and the use of diverse grey-zone tactics. Australia's national interests are being more directly challenged than in the past, and sharper prioritisation is required to focus on the highest-priority threats to Australia's national interests.

The Defence Strategic Update outlines Australia's new defence strategy to respond to our changing strategic environment. It sets three new strategic objectives to guide all Defence planning, including capability, international engagement and operations: to shape Australia's strategic environment for peace and prosperity; to deter actions against Australia's interests; and to respond with credible military force, when required.

The Update recognises that the Australian Defence Force must remain a de-

ployable force, capable of operating across the Indo-Pacific, and further afield when required. Through our recent Update, we have sought to ensure our defence policy settings enable us to respond flexibly to new challenges as they emerge. Importantly, the Update prioritises Australia's military engagement in the Indo-Pacific. This means working even more closely with regional countries, including Indonesia, to support regional stability and economic prosperity.

The Australian Government is committed to building on our special relationship with ASEAN to help strengthen ASEAN's role at the centre of regional dialogue and cooperation. We are also looking to enhance mini-lateral military relationships across the region, such as trilateral and quadrilateral cooperation on issues of shared interest, with the common objective of reinforcing sovereignty and regional stability. We are keen to work with likeminded partners, such as Indonesia and India, in this regard.

It also means building on Australia's investment in the Pacific and ensuring the continuing effectiveness of our Pacific Step-up. Alongside Southeast Asia, the Pacific is front and centre of Australia's

strategic outlook, foreign policy and personal connections.

Excluding the South China Sea, what areas are of concern to Australia?

The current strategic environment is challenging our interests more directly than before. Ultimately, Australia wants a free and prosperous Indo-Pacific region. In recent years, strategic competitions have seen major powers become more assertive in advancing their strategic preferences and seeking to exert influence in our immediate region. At the same time, the rules, norms, and institutions that help maintain peace and security are under strain. It is essential that countries pursue their interests in ways that are mutually respectful and supportive of stability, prosperity, and security.

COVID-19 is creating even more uncertainty. The precise long-term security implications are not yet clear, but its impact on regional growth, trade and societies will have lasting consequences which could undermine political and social stability. Accelerating military modernisation, emerging and disruptive technologies, as well as expanding cyber



capabilities, are further complicating Australia's environment.

Several media reported that Australia and Japan are concluding a defence pact during Australian Prime Minister Scott Morrison's visit to Japan. What factors underlie the establishment of a defence pact?

Prime Minister Morrison visited Japan on 17 November, where he and Prime Minister Suga announced that Australia and Japan had reached "agreement in principle" on a Reciprocal Access Agreement (RAA). In challenging times like these, the value of Australia and Japan's cooperation has never been greater. Establishing the RAA will streamline arrangements for our forces to operate in each other's territories, and move the bilateral defence relationship towards the deep interoperability we aim for. This will enhance Australia and Japan's ability to work with other likeminded partners, in support of a peaceful, stable Indo-Pacific.

Australia and the USA have apparently signed a classified statement related to how their militaries work together. The move would establish "a bilateral force posture Working Group to develop recommendations that will advance force-posture cooperation in the Indo-Pacific to promote a secure and stable region and deter coercive acts and the use of force". How do these recommendations alter and affect current arrangements between Australia and Indonesia?

At AUSMIN 2020, Australia and the United States agreed to an ambitious set of defence outcomes to advance our cooperation, including signing a Statement of Principles on Alliance Defence Cooperation and Force Posture Priorities in the Indo-Pacific to guide our contribution to regional security, which will support an Indo-Pacific that is secure, prosperous, inclusive and rules-based, and deters malign behaviour.

The Joint Statement of Principles does not alter or diminish our relationship with

Indonesia. Australia makes decisions on US engagement in line with our national interest. We support the US as it continues its role underwriting security in our region. Australia will continue to work with the United States, and all our regional partners, to build defence cooperation in the region to meet security challenges, and to build common approaches to ensure stability in our region.

How does Australia see the development of defence cooperation between Australia and the Republic of Indonesia at present?

Excellent. Australia and Indonesia share a unique bond as neighbours at the maritime crossroads of Indian and Pacific Oceans. Maintaining a secure and stable region is a strategic priority for both our countries, and this drives our cooperative activities. We share many common security interests, including a shared maritime border, and commitment to promoting peace and stability in our region. Our defence cooperation largely focuses on education and training, humanitarian assistance and disaster relief, maritime security and peacekeeping.

Prior to the COVID-19 pandemic, 2020 was on track to be our most active year yet in the Australia-Indonesia defence relationship. The COVID-19 pandemic has meant that many of these activities have had to be postponed, but we have still been able to maintain some of our education and training activities and are expanding our cooperation on military medicine.

Our senior leaders have maintained close contact throughout the pandemic, sharing our experience in dealing with COVID-19 and lessons learned. Australia and Indonesia Defence Ministers have been speaking regularly, as have our military chiefs, Chief of the Australian Defence Force, GEN Angus Campbell, and Indonesian Military Commander Air Chief Marshal Hadi Tjahjanto. Service Chiefs and the policy officials have also remained connected.

It was during their phone call in June that Defense Minister Reynolds offered 30 tonnes of personnel protection equipment under our Defence Cooperation Program to Defense Minister Prabowo to help keep our TNI friends safe, as they work to overcome the COVID-19 pandemic and

support the Indonesian people.

The two ministers have been keeping in close contact throughout the pandemic, and Defense Minister Reynolds was pleased to be able to offer assistance, especially after the support Indonesia provided during the devastating bushfires in Australia earlier this year. Australia and Indonesia have a long history of supporting each other in time of need and crisis, dating back to Indonesian support after Cyclone Tracey devastated Darwin in 1974. I am confident this cooperation will return to previous high levels once the COVID-19 pandemic has been overcome.

What are the currently active high priority threats that the Australian Intelligence committee view exist as purely an Indonesian issue, and how do the two governments work together to ensure that these threats are addressed?

Australia does not comment publicly on intelligence matters. What I can say is that intelligence cooperation is a key element of our bilateral defence relationship, guided by our common interests. This cooperation is based on the principles outlined in the 2006 Lombok Treaty and the code of conduct set out in this and in the 2014 Joint Understanding on intelligence cooperation. This includes a commitment to promote intelligence cooperation in accordance with respective national laws, and overseen by the Joint Intelligence Sub Committee, which reports to the Indonesian military (TNI) commander /CDF co-chaired High Level Committee.

The Indonesian Navy (TNI AL) and Royal Australian Navy (RAN) conducted military exercise in Anambas waters on 8 December 2020. What is the aim of the military exercise? What should both Navies do in maintaining regional stability?

TNIAL and RAN routinely exercise together at sea, including during our annual Coordinated Patrol and CASSOWARY Exercise. Whenever RAN or TNIAL ships are passing near their neighbour's waters and have time to spare, we also attempt to





conduct a passage exercise (PASSEX). On average, our navies conduct 4-6 PASSEX each year, and this is a fantastic opportunity for us to renew and reinforce our friendship.

As partners with many shared security interests, it is important to take advantage of these opportunities as they arise. We share one of the longest maritime boundaries in the world. The North-Eastern Indian Ocean and the Timor and Arafura Seas, with which we both have a shared interest, are rich in natural resources and threatened by illegal fishing, smuggling and other transnational crimes. That we can do these PASSEX with minimal notice and limited preparation underwrites the professionalism of both navies and our growing interoperability.

What are the key areas of mutual interest in regard to Defence Manufacturing and how should both countries create a mutually beneficial defence industry in the near future?

Defence industry collaboration is a new, but growing area of cooperation in our bilateral defence relationship. Guided by strong support from our Defence Ministers, the Defence Industry and Military

Modernisation Working Group of the Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue meets annually to discuss opportunities for collaboration and cooperation in the areas of military modernisation, planning, acquisition and sustainment, and science and technology cooperation.

Defence seniors also get to meet regularly in the margins of major defence industry export activities, such as the Ministry of Defence's Indo Defence Expo and the Australian-based expos, including the Australian Army's Land Forces, the Australian Air Force's Avalon International Airshow and the Australian Navy's Pacific Maritime Expo.

In 2018, we commenced an annual Bilateral Defence Industry Seminar, designed to help familiarise Australian and Indonesian companies with the others' market and to increase defence industry's understanding of each country's industry policy settings and capability acquisition plans.

It's been great to see Australia and Indonesian defence industry getting involved, with many companies currently exploring opportunities for collaboration, recognising the partnerships can wield mutual benefit and help meet the capability requirements of our militaries. We look forward to seeing the partnerships and innovation of Australia and Indone-

sian defence industry in the years to come.

What key outcomes do you expect from an Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership?

As our region becomes more complex, I expect our interests will become even more closely aligned. A peaceful, inclusive, sovereign and resilient region where the rights of all states are respected in both our interests. Our focus in 2021 will be on returning to our previous high levels of activity, pending the COVID-19 situation. We had many exciting new defence activities planned for 2020, which we will look to return to as soon as possible. This includes synchronising some of our Service-to-Service exercises to make them more complex, resulting in better exercise outcomes, and further enhancing our ability to work together.

Our defence relationship reflects the trajectory of our broader bilateral partnership. In 2018, we signed our Comprehensive Strategic Partnership and just this year, our Comprehensive Economic Partnership Agreement entered into force. This offers great opportunities for enhanced cooperation and collaboration between our two countries, and I look forward to seeing people-to-people links continue to strengthen, especially in the business-to-business space. I see many opportunities for mutually-beneficial cooperation, especially between our respective defence industries.

Speaking of people-to-people links, next year marks the ten-year anniversary of our Australia-Indonesia Defence Alumni Association, IKAHAN. Over the last ten years, IKAHAN has played an important role in maintaining and strengthening people-to-people links between our two militaries, and promoting mutual understanding and trust.

IKAHAN was formally launched on March 2011 by the now Governor-General of Australia, H.E General the Honourable David John Hurley AC DC (Retd.) and Air Marshal (Retd.) Edy Harjoko, and has grown to over 3,000 members today. I look forward to celebrating this important milestone with my friends and partners in the TNI next year, when the COVID-19 circumstances allow. ●